

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat tersusun. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Perubahan Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dikemas dalam delapan bab, meliputi: Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Gambaran Pelayanan Daerah memuat tentang tugas, fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang BAPPPEDA Kabupaten Sumedang. Permasalahan dan isu-isu strategis memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bapppeda Kabupaten Sumedang serta penentuan isu-isu strategis. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Strategi dan Arah Kebijakan memuat Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja serta kerangka pendanaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dan Penutup, memuat tentang ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam meng- implementasikan Renstra BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kabupaten Sumedang. Semoga ke depan dokumen Renstra BAPPPEDA Kabupaten Sumedang yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 4 Januari 2022

Kepala BAPPPEDA Kabupaten
Sumedang



Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1. Kondisi Kepegawaian	14
2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang BAPPPEDA	27
2.4.1. Tantangan	27
2.4.1.1. Adanya Intervensi Politik yang mempengaruhi Sistem Perencanaan dan Penganggaran	27
2.4.1.2. Data dan Informasi Dari SKPD/UKPD	28
2.4.2. Peluang	31
2.4.2.1. Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung	31
2.4.2.2. Perkembangan IPTEK Dalam Mendukung Peran BAPPPEDA	32
2.4.2.3. Adanya Dukungan/ Partisipasi Masyarakat (Individu- Corporate-Universitas)	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.2.1. Visi	35
3.2.2. Misi	36
3.3 Telaah Rencana Strategis Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappppeda Kabupaten Sumedang	38
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	42



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA.....	46
5.2 Strategi.....	47
5.3 Arah Kebijakan.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
BAB VIII PENUTUP	101



DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Golongan Pangkat Tahun 2018	12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Jabatan Struktural Tahun 2018	13
Tabel 2.3	Daftar Aset sampai dengan Tahun 2018	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	18
Tabel 2.5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Bappppeda Kabupaten Sumedang Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	26
Tabel 3.2	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan BAPPPEDA dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023	29
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappppeda Kabupaten Sumedang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran BAPPPEDA	35
Tabel 5.1	Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal	36
Tabel 5.2	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang	39
Tabel 6.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	55



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang	10
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	11
Gambar 2.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018	12
Gambar 4.1	Tujuan Jangka Menengah BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang	34



BAB 1

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappppeda, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan, penelitian dan Pengembangan daerah.

Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dengan visi “Sumedang Simpati (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif Pada Tahun 2023” yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan



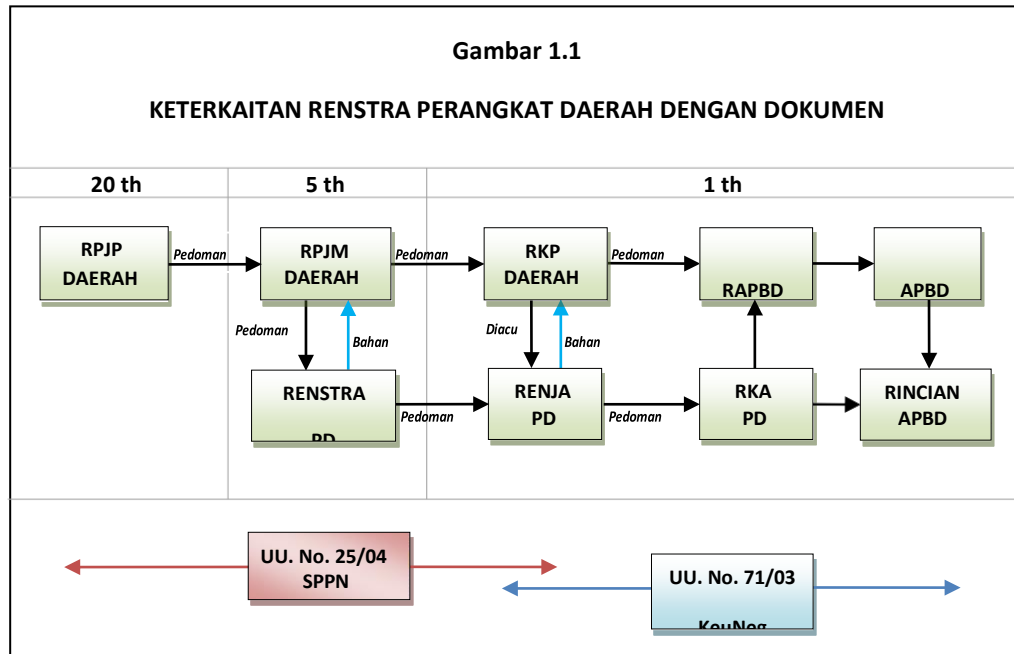
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023.

Perubahan RPJMD ini dilakukan berkenaan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 2 tentang UU 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Adanya refocusing anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan, sehingga Refocusing Anggaran ini menjadi salah satu alasan penyusunan Perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023.

Alasan lain dilaksanakannya perubahan RPJMD ini adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah memaksa daerah untuk menyeragamkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan tersebut.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menguraikan visi dan misi daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 2018-2023. Uraian tersebut secara sistem merupakan penjabaran arahan, target yang tertera dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 28. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
 30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



- Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18) ;
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
 38. Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 adalah sebagai acuan resmi bagi komponen/aparatur Bappppeda dalam penyusunan Rencana Kerja Bappppeda, penentuan pilihan- pilihan program kegiatan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Bappppeda adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah tahun 2018–2023, dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Bappppeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur BAPPPEDA; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BAPPPEDA dalam menjalankan tugas dan fungsinya kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh BAPPPEDA;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPPEDA; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang lima tahun mendatang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN LAYANAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Bappppeda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan. Bappppeda dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bappppeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bappppeda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bappppeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan

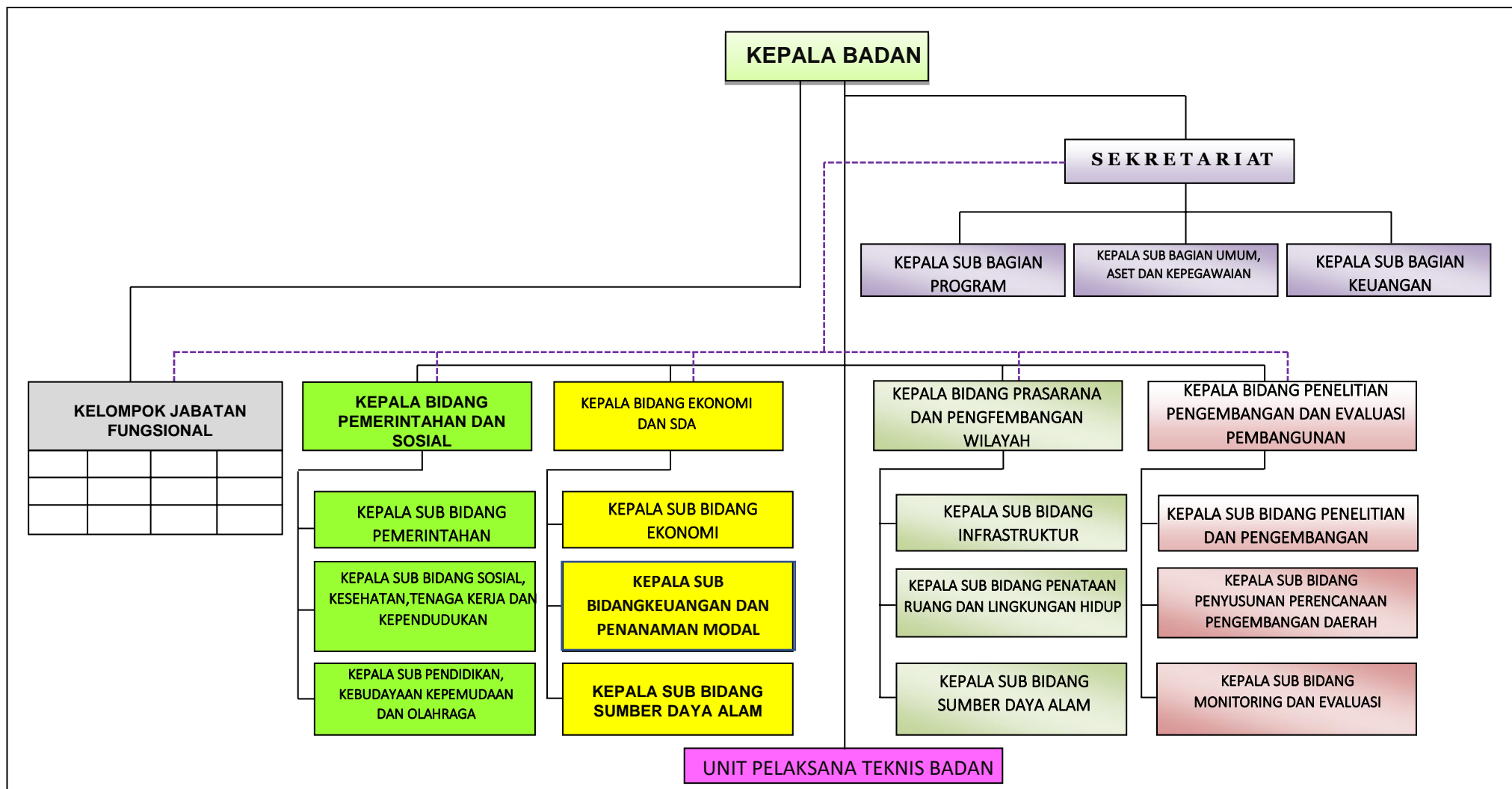


kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Bidang lingkup Bappppeda.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Subbagian Program
 - 2) Subbagian Umum Aset dan Kepegawaian
 - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pemerintahan
 - 2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 3) Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga kerja da Kependudukan
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1) Subbidang Ekonomi
 - 2) Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal
 - 3) Subbidang Sumber Daya Alam
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan
 - 1) Subbidang Infrastruktur
 - 2) Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
 - 3) Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





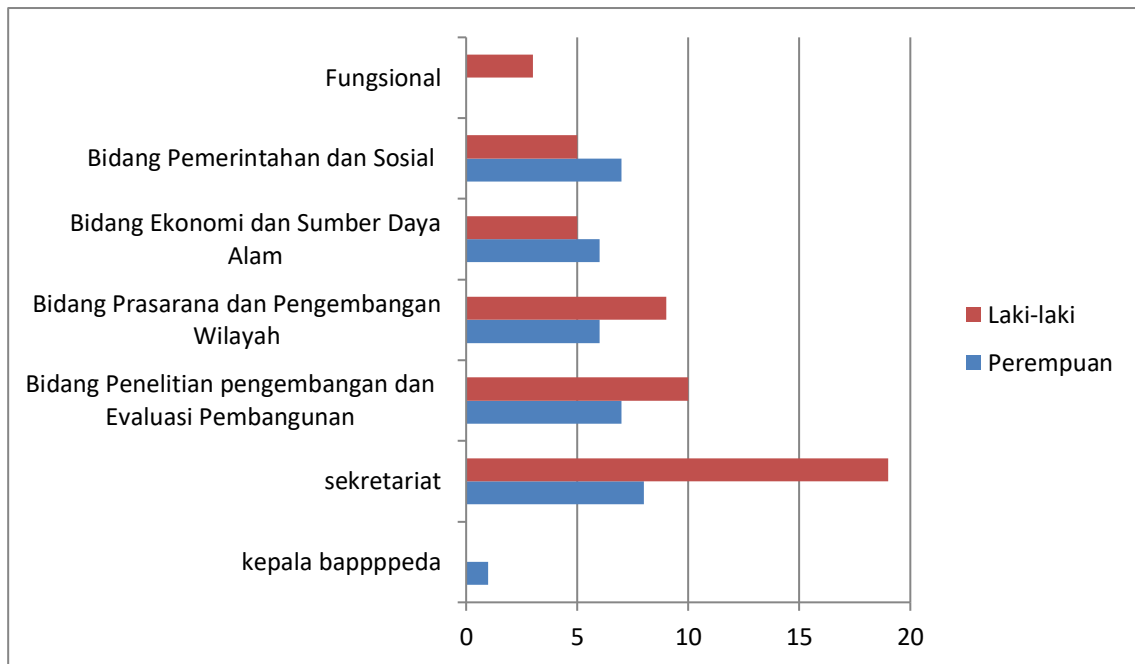
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap / Non PNS. Sampai dengan tahun 2018 jumlah pegawai pada Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah 85 orang yang terdiri dari 61 orang PNS dan 24 orang Non PNS, dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



Perbandingan pegawai berjenis kelamin laki – laki adalah 10:7 atau bisa dikatakan bahwa 41,18% pegawai di Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah perempuan.



Tabel 2.1

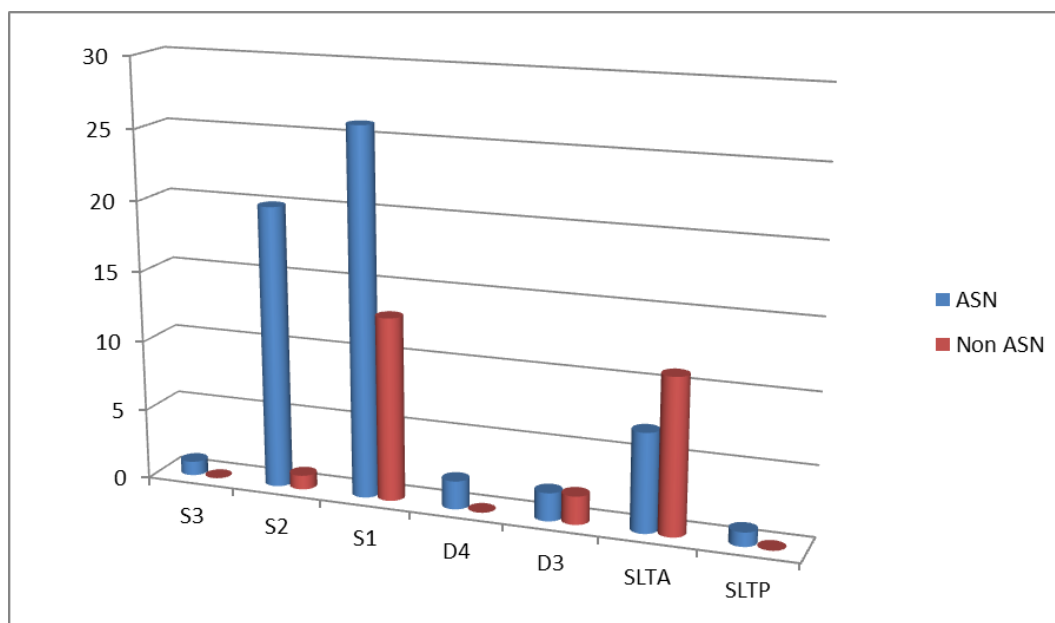
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Golongan Pangkat Tahun 2020

Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala Badan	-	-	-	1	1
Sekretariat	0	7	14	2	23
Bidang Penelitian Pengembangan Dan Evaluasi Pembangunan	0	1	9	1	11
Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	1	-	9	1	11
Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	-	-	4	1	5
Bidang Pemerintahan Dan Sosial	-	-	4	2	6
Fungsional	-	-	3	-	3
Tugas Belajar	-	-	1	-	1
Jumlah	1	8	44	8	61

Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara Di Bappppeda Kabupaten Sumedang sebanyak 61 orang dengan didominasi golongan III sebanyak 44 orang atau 72,13% dari seluruh ASN Bappppeda Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II dan golongan IV masing-masing sebesar 13,11% yaitu berjumlah masing-masing 8 orang dan sisanya sebesar 1.64% adalah golongan I yaitu sebanyak 1 orang.

Gambar 2.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2020





Mayoritas pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 atau 34,12% dari seluruh jumlah pegawai, berpendidikan kemudian S2 sebesar 29,41%, berpendidikan SLTA sebesar 24,71%, berpendidikan D3 sebesar 7,06% dan untuk pegawai s3 sama dengan berpendidikan SLTA sebesar 1,18%.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Bappppeda
Kabupaten Sumedang Menurut
Jabatan Struktural Tahun 2020

No	Unit	Pelaksana	JFT	Eselon			Jumlah
				II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	19	-	-	1	3	23
3	Bidang Penelitian Pengembangan Dan Evaluasi Pembangunan	7	1	-	1	3	12
4	Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	7	1	-	1	3	12
5	Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	1	1	-	1	3	6
6	Bidang Pemerintahan Dan Sosial	3	-	-	1	3	7
7	Tugas Belajar	1	-	-	-	-	1
	Jumlah	38	3	-	5	15	61

Berdasarkan jabatan struktural Bappppeda Sumedang memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 5 Pejabat eselon III, 15 pejabat eselon IV, 38 pelaksana dan 3 Jabatan fungsional perencana.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3

DAFTAR ASET

SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

BARANG	NIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG (unit,Buah)	KETERANGAN
	3		
TANAH)		NIHIL	
PERALATAN DAN MESIN)			
02.02.03.01.03	Alat Penarik Lain-lain	1	
02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	7	
02.03.01.03.05	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain/Asserories	1	
02.03.01.05.01	Sepeda Motor	35	
02.04.01.06.04	Mesin Penghalus	1	
02.04.02.05.01	Tool Kit Set	1	
02.04.03.01.63	Memori Programmer	2	
02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	14	
02.04.03.07.10	Scanner	9	
02.04.03.08.24	Air Conditioning Unit	5	
02.05.02.03.004	Rak Penyimpanan	1	
02.06.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable	2	
02.06.01.01.07	Mesin Ketik Elektronik	2	
02.06.01.04.01	Lemari Besi	8	
02.06.01.04.03	Rak Kayu	7	
02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	33	
02.06.01.04.12	Lemari Kaca/Kayu	22	
02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	5	
02.06.01.05.06	Papan Nama Instansi	1	
02.06.01.05.10	White Board	14	
02.06.01.05.17	Mesin Absensi	4	
02.06.01.05.37	White Board Elektronik	1	
02.06.01.05.43	Mesin Pompa Air	3	
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	5	
02.06.02.01.10	Meja Rapat	4	
02.06.02.01.27	Kursi Rapat	202	
02.06.02.01.28	Kursi Tamu	7	
02.06.02.01.37	Meja Komputer	46	



02.06.02.01.49	Sofa	11	
02.06.02.01.66	Kursi Kerja	10	
02.06.02.01.67	Gordyn	6	
02.06.02.01.69	Rak TV	6	
02.06.02.01.72	Dinding/Sekat Besi	11	
02.06.02.01.73	Karpet	4	
02.06.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	5	
02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1	
02.06.02.04.01	Lemari Es	1	
02.06.02.04.03	AC Unit	13	
02.06.02.04.03	Unit Kipas	2	
02.06.02.05.15	Dispenser	4	
02.06.02.06.03	Televisi	8	
02.06.02.06.27	Alat Hiasan	15	
02.06.03.01.03	Local Area Network (LAN)	11	
02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	65	
02.06.03.02.02	Lap Top	41	
02.06.03.02.03	Note Book	98	
02.06.03.03.01	Card Reader	4	
02.06.03.03.06	CPU	2	
02.06.03.03.11	Ploter	1	
02.06.03.04.04	Storage Modul Unit	18	
02.06.03.04.08	Printer	155	
02.06.03.04.15	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	24	
02.06.03.04.16	Flashdisk	5	
02.06.03.05.02	Monitor	10	
02.06.03.05.04	Scanner	9	
02.06.03.05.11	UPS	3	
02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	32	
02.06.03.05.17	Webcam	1	
02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	13	
02.06.03.06.12	Wireless Lan (USB)	9	
02.06.04.01.10	Meja Kerja	78	
02.06.04.02.14	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	28	
02.06.04.03.09	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	101	
02.06.04.04.08	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	235	
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	12	



	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	33	
	02.07.01.01.45	Professional Sound System	71	
	02.07.01.01.82	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	
	02.07.01.01.83	Handycam	17	
	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	2	
	02.07.01.02.03	Camera Electronic	23	
	02.07.02.01.04	Amplifier	2	
	02.07.02.01.07	Megaphone	1	
	02.07.02.01.09	Telephone (PABX)	15	
	02.07.02.01.14	Handy Talky	7	
	02.07.02.01.20	Facsimile	1	
	02.07.02.06.04	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	34	
	02.07.03.01.04	Peralatan Pemancar MF/MW Lain-lain	1	
	02.09.01.49.01	Alat Ukur/Drone	1	
	02.09.04.02.57	Modular Counting & Scentific Lain-lain	1	
	02.10.05.01.04	CCTV	10	
C	KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)			
1	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	
2	03.11.01.01.02	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3	
3	03.11.01.01.04	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	
4	03.11.01.01.07	Bangunan Gudang Lain-lain	1	
5	03.11.01.14.04	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	2	
6	03.11.01.27.04	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain		
D	KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)			
1	04.14.01.02.06	Sumur dengan Pompa	1	
2	04.14.02.03.05	Saluran Penyimpanan Air	1	
3	04.15.07.01.04	Instalasi	1	
4	04.16.02.02.02	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	4	
5	04.16.03.01.02	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang	1	
E	KIB E (ASET LAINNYA)			
1	05.18.02.04.03	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	1	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappppeda Kabupaten Sumedang



berikut ini diperoleh dari laporan-laporan evaluasi kinerja (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja-RKA-DPA-DPPA dsb). Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.4, sedangkan gambaran capaian realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5.



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencana an Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)				100	100	75	100	100	83.61		74.67	100	12.66			100	100	
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100	100	100	100	100	96.62		100	100	0			100	100	
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya				100	100	100	100	100	95.86		96.79	100	0			97	100	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA				tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia		tersedia	tersedia	tersedia			100	100	



	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan ERKADA				tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia		tersedia	tersedia	tersedia			100	100	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA				tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia		tersedia	tersedia	tersedia			100	100	



Kinerja pelayanan perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:



Tabel 2.5

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

an	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	3,954,641,878	3,740,587,964		4,422,661,511		3,948,260,332	3,745,992,061	4,616,088,431	1,605,523,987		99.84		98.82	36.30	48.76	86.86	82.85
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	3,409,942,000	2,616,699,000		1,804,740,000		3,172,910,000	2,489,211,000	1,590,820,000	579,320,000		93.05		98.45	32.10	26.10	57.08	35.54
- Belanja Barang dan Jasa	8,754,279,700	6,538,241,860		5,944,179,150		7,715,560,673	5,829,712,760	5,325,699,393	1,818,120,484		88.13		98.56	30.59	32.65	74.03	62.16

Rencana Strategis

*Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023*



- Belanja Modal	3,024,244,800	2,463,915,340		185,670,000		2,609,483,350	2,439,970,200	535,678,700	167,483,000		86.29		99.42	90.20	65.62	56.89	50.68



Secara umum, capaian kinerja BAPPPEDA pada periode 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam *Tabel 2.4* telah menggambarkan kinerja yang sesuai dengan kewenangannya, namun demikian masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya pada periode mendatang. Lebih lanjut penjabaran indikator yang tercantum di *Tabel 2.4* dijabarkan pada poin-poin di bawah ini :

- A. *Indikator Persentase Kesesuaian Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Selama periode 2013-2017 realisasi indikator ini memiliki tren capaian yang fluktuatif. Ketercapaian target indikator ini hanya terjadi pada tahun 2016. Jika mengacu pada ketentuan, maka indikator ini harus mencapai standar 100% setiap tahunnya.
- B. *Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Selama periode 2013-2017 realisasi indikator yang mencapai target hanya terjadi di tahun 2015 dan 2016. Jika mengacu pada ketentuan, maka idealnya setiap tahun perlu tercapai target 100%.
- C. *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya*. Selama periode 2013-2017 realisasi indikator ini hanya satu kali mencapai target, yakni pada tahun 2016. Adapun capaian tahun 2017 nol dikarenakan sedang melakukan proses review terhadap dokumen RTRW Kab. Sumedang.
- D. *Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA*. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2013-2016 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi.
- E. *Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA*. RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2014-2018 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun



2014-2018.

- F. *Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA.* Selama periode 2014-2018 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.4. Tantangan dan Peluang BAPPPEDA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang berpotensi semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh BAPPPEDA Kabupaten Sumedang menuntut peningkatan peran dan kapasitas BAPPPEDA dalam menciptakan berbagai Kebijakan Pembangunan Daerah yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

2.4.1.1. Masih kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat, yang letak daerahnya berada di jalur strategis, yakni jalur pengembangan pembangunan nasional antara wilayah Bandung-Cirebon. Dengan segala potensi yang dimilikinya, tidak heran jika Kabupaten Sumedang kini menjadi salah satu daerah incaran para investor yang ingin berinvestasi mengembangkan usahanya. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya investasi tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat yang cenderung ingin mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima relatif kecil. Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu bahwa produk yang dikonsumsi merupakan barang impor. Bahkan tidak jarang masyarakat kita lebih bangga menggunakan produk impor daripada produk domestik. Dengan kenyamanan seperti ini, rasanya mustahil membujuk masyarakat untuk mau berinvestasi di Kabupaten Sumedang, karena risikonya masih tergolong tinggi. Faktor yang



mempengaruhi kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang diantaranya:

1. Infrastruktur pendukung investasi hanya berpusat pada beberapa wilayah tertentu, tidak tersebar secara merata;
2. Prosedur yang ditetapkan untuk berinvestasi dinilai masih terlalu rumit dengan kewajiban pengisian formulir investasi yang cukup tebal dan mau tidak mau harus berhubungan dengan banyak pihak dan meminta kemampuan dari pemilik modal tersebut yang dikatakan akan mempermudah proses investasi, contohnya adalah kemampuan penggunaan IT dalam bertransaksi. Namun prosedur yang rumit ini sebenarnya merupakan langkah untuk memproteksi diri pemilik modal sehingga lebih menjamin keamanan bagi mereka sendiri;
3. Investasi kerap disamakan dengan riba atau penimbunan yang dikenal sebagai salah satu kegiatan yang sangat dilarang secara agama. Mungkin yang perlu dipertegas di sini adalah investasi bukanlah penggandaan uang meski sekilas terlihat sama karena pemilik modal tidak terlibat secara langsung dalam jalannya roda perusahaan;
4. Masyarakat belum terbiasa untuk berinvestasi pada barang yang tak terlihat, lebih menyukai jenis investasi yang jelas-jelas terlihat wujud barangnya sehingga mereka lebih bisa merasa aman dan nyaman karena mereka sendiri yang memegang barang investasi tersebut. Selain itu masyarakat umumnya tidak sabar dalam berinvestasi, belum mengarah pada kedewasaan atau *drive to maturity*.

2.4.1.2. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer dalam Pendanaan Pembangunan

Dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan memberikan transfer kepada daerah. Dana transfer (Dana Perimbangan) diberikan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah yaitu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



Kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih rendah dalam menjalankan otonomi daerah. Masih banyak Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki kategori kurang dan sangat kurang, hal ini memperlihatkan kebutuhan anggaran daerah yang besar dan tidak sebanding dengan peningkatan PAD.

Tabel Kemandirian Fiskal (IF) Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Prov. Jawa Barat	76.92	59.15	64.25	67.40	66.78	61.54	56.22	64.61
Kab. Bandung	11.86	12.62	15.06	17.38	17.52	18.59	18.44	15.92
Kab. Bekasi	25.35	28.75	34.34	39.44	40.77	41.92	46.31	36.70
Kab. Bogor	19.85	26.51	27.58	31.85	33.19	38.37	43.61	31.57
Kab. Ciamis	3.68	4.70	5.35	9.09	7.86	8.63	8.64	6.85
Kab. Cianjur	8.32	10.60	11.84	15.66	14.60	14.04	14.22	12.75
Kab. Cirebon	10.88	11.53	10.83	16.57	15.14	15.73	21.70	14.63
Kab. Garut	5.92	7.91	8.78	11.85	11.84	10.28	15.65	10.32
Kab. Indramayu	8.64	8.73	8.24	12.73	12.04	11.22	17.61	11.32
Kab. Karawang	18.72	26.76	24.55	28.43	37.68	28.09	33.74	28.28
Kab. Kuningan	6.33	6.67	6.92	10.68	9.66	10.43	14.69	9.34
Kab. Majalengka	6.78	6.59	7.95	10.85	11.38	12.87	19.13	10.79
Kab. Purwakarta	11.22	13.10	12.67	18.37	18.82	18.11	21.96	16.32
Kab. Subang	6.70	7.72	7.89	11.77	13.07	14.03	20.31	11.64
Kab. Sukabumi	8.18	9.11	11.35	15.53	15.86	16.12	21.32	13.93
Kab. Sumedang	10.36	10.84	11.05	14.46	13.89	14.45	20.81	13.69
Kab. Tasikmalaya	3.40	3.36	3.18	6.01	6.78	6.73	12.10	5.94
Kota Bandung	26.75	27.42	33.30	34.64	36.48	37.87	44.96	34.49
Kota Bekasi	25.60	27.28	32.73	34.63	37.92	38.04	41.80	34.00
Kota Bogor	20.19	22.18	29.52	31.00	32.80	36.42	42.73	30.69
Kota Cirebon	14.32	17.14	20.40	24.19	22.79	26.44	31.93	22.46
Kota Depok	21.27	29.04	30.25	29.86	33.23	37.09	42.52	31.89
Kota Sukabumi	18.29	20.26	20.78	25.93	25.95	25.39	29.52	23.73
Kota Tasikmalaya	12.05	14.42	12.66	15.88	15.14	15.84	19.46	15.06
Kota Cimahi	16.17	16.57	19.64	20.41	22.65	23.47	25.91	20.69
Kota Banjar	9.39	10.03	11.37	17.63	16.30	14.27	15.45	13.49
Kab. Bandung Barat	7.40	9.57	11.20	13.01	14.60	16.78	22.24	13.54

Tabel Ketergantungan Fiskal (DF) Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Prov. Jawa Barat	22.85	16.78	15.34	14.61	10.44	38.36	43.47	23.12
Kab. Bandung	61.60	67.33	62.49	56.01	51.61	64.94	59.23	60.46
Kab. Bekasi	48.96	52.03	42.42	39.65	35.82	42.23	37.03	42.59
Kab. Bogor	51.60	51.81	50.61	46.45	42.82	45.07	39.32	46.81
Kab. Ciamis	70.23	72.48	68.02	63.34	58.55	59.57	66.40	65.51
Kab. Cianjur	66.15	70.28	67.73	60.71	55.55	66.49	58.48	63.63
Kab. Cirebon	61.72	66.57	64.25	58.01	53.51	64.20	57.76	60.86
Kab. Garut	67.56	73.44	69.21	64.87	57.76	65.89	60.12	65.55
Kab. Indramayu	66.51	71.14	68.00	62.18	58.29	66.02	60.05	64.60
Kab. Karawang	59.43	57.45	56.80	49.41	57.92	54.86	48.68	54.94
Kab. Kuningan	65.88	70.96	70.10	66.91	57.92	70.68	65.80	66.89
Kab. Majalengka	76.81	81.01	65.40	61.87	54.83	66.92	62.93	67.11
Kab. Purwakarta	62.66	68.51	65.53	58.54	52.50	57.13	51.00	59.41



Kab. Subang	71.35	75.60	72.32	63.96	60.40	71.31	64.46	68.49
Kab. Sukabumi	67.33	72.88	67.00	59.80	55.33	64.92	51.99	62.75
Kab. Sumedang	72.23	73.45	70.58	61.52	53.85	67.33	59.97	65.56
Kab. Tasikmalaya	69.34	70.65	63.94	60.04	59.42	64.72	62.77	64.41
Kota Bandung	45.16	49.28	41.06	38.07	34.64	42.98	39.94	41.59
Kota Bekasi	43.24	45.42	40.27	36.97	33.74	38.99	34.41	39.00
Kota Bogor	52.75	54.67	50.37	48.68	42.60	51.00	46.85	49.56
Kota Cirebon	63.58	74.88	62.40	55.85	55.07	63.40	58.94	62.02
Kota Depok	51.09	49.91	45.76	44.02	39.62	44.99	40.76	45.16
Kota Sukabumi	64.50	66.23	63.89	57.23	53.61	60.37	57.53	60.48
Kota Tasikmalaya	62.73	64.67	55.40	53.01	52.92	67.05	61.12	59.56
Kota Cimahi	58.49	62.02	58.53	55.98	52.94	64.30	55.40	58.24
Kota Banjar	62.98	66.54	63.70	63.07	58.22	68.60	64.38	63.93
Kab. Bandung Barat	63.30	68.65	62.42	58.49	53.84	65.30	57.89	61.41

Berdasarkan data diatas, Kabupaten/Kota yang diwarnai adalah Kabupaten/Kota yang memiliki Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal yang tinggi dan rendah. Namun Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kemandirian fiskal yang berkategori kurang dan ketergantungan fiskalnya terkategori sangat tinggi (Adhitya Wardhana, Anhar Fauzan & Arief Bustaman ; 2018). Karena ketergantungan fiskal yang masih terkategori sangat tinggi meski masih ada kabupaten/kota yang ketergantungan fiskalnya lebih tinggi, maka berarti Kabupaten Sumedang belum dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dan juga kemandirian fiskal Kabupaten Sumedang yang terkategori kurang maka Kabupaten Sumedang masih harus menggali sumber – sumber potensial untuk meningkatkan objek pajak, karena berdasarkan perkembangan peranan PAD dalam meningkatkan aktifitas perekonomian belum optimal. Perencanaan aktifitas perekonomian yang terarah dan konsisten merupakan kunci utama untuk meningkatkan nilai PAD.

2.4.1.3. Ancaman Daya saing Kabupaten tetangga yang lebih potensial dalam produksi barang dan jasa

Pembangunan ekonomi daerah yang telah disusun diharapkan dapat mampu menghasilkan produk unggulan yang bermutu serta berdaya saing dalam kompetisi perdagangan bebas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seperti halnya Kabupaten Sumedang yang memiliki produk – produk unggulan baik barang maupun jasa, diantaranya produksi : Ubi Cilembu, Sawo Sukatali, dan Mangga Gedong Gincu yang cukup populer di Jawa Barat namun disatu sisi daerah tetangga yaitu Kabupaten Majalengka dan



Kabupaten Indramayu pun mempunyai produk unggulan yang sama yaitu Mangga Gedong Gincu, bahkan masing – masing daerah sudah mampu melakukan ekspor sehingga memunculkan daya saing daerah yang cukup tinggi.

Daya saing lainnya yaitu dibidang jasa pendidikan, Kabupaten Sumedang yang merupakan daerah dengan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, disamping itu pertumbuhan jasa bimbingan belajar juga cukup berkembang untuk menunjang proses pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Maka daerah dalam hal ini kabupaten diharapkan mampu secara optimal dalam melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang secara terfokus mengarah kepada produk – produk unggulan daerah masing – masing agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas minimal di wilayahnya sendiri dengan kata lain dapat bersaing dengan kabupaten – kabupaten tetangga.

Dengan harapan tersebut maka diperlukan berbagai macam upaya yang dapat menunjang percepatan pengembangan produk unggulan berorientasi pasar yang memperhatikan berbagai peluang bisnis dan investasi yang secara nyata dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerahnya.

2.4.2 Peluang

2.4.2.1. Sumedang merupakan Kawasan Strategis Nasional

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPPEDA tidak terlepas dari dukungan peraturan perundangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian baik secara vertikal maupun horizontal.. Undang–undang yang sangat signifikan mengubah peran instansi perencana di daerah yang mendukung pelaksanaan sistem desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah adalah Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang memungkinkan pemerintah daerah berperan dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.



2.4.2.2. Pemanfaatan IPTEK disemua aspek sejalan dengan era industry 4.0

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan pembangunan daerah masyarakat secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kehidupan yang lebih baik untuk warga Kabupaten Sumedang dukungan IPTEK perlu terus dikembangkan, khususnya dalam bidang teknologi informasi.

Dalam konteks tugas dan fungsinya, BAPPPEDA perlu mendorong Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Sumedang untuk memanfaatkan IPTEK, antara lain dengan mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan data dan analisisnya dalam menyusun perencanaan (program dan kegiatan). Lebih lanjut BAPPPEDA perlu mengoptimalkan pemanfaatan data dan analisa yang dihasilkan dari pengembangan system informasi dalam proses perencanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga hal tersebut dapat mendorong pemanfaatan *EPlanning*, *E-Budgeting* yang lebih tepat guna. Hal ini menjadi peluang bagi BAPPPEDA dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Sumedang.

2.4.2.3 Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat atau stakeholder merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, manifestasi partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan dari sektor Korporasi maupun dari Perguruan Tinggi dalam berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini Kabupaten Sumedang memiliki peluang yang tinggi



karena banyak terdapat perguruan tinggi berkualitas di Kabupaten Sumedang, serta pembangunan megaproyek di Kabupaten Sumedang dapat menjadi momentum menarik korporaasi untuk berpartisipasi berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas BAPPPEDA kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada beberapa permasalahan yang secara umum terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum teratasi oleh peluang yang belum termanfaatkan. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Bappppeda Kabupaten Sumedang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Tugas dan Fungsi	Permasalahan
	Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah	Belum optimalnya integrasi e-planning e-budgetting secara utuh;
	Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Belum optimalnya integrasi e-planning e-budgetting secara utuh;
	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Belum konsistennya hasil evaluasi pembangunan dalam penyempurnaan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah;
	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Masih kurangnya SDM pada sector strategis;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan,



dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra BAPPPEDA periode 2018-2023 selaras dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun



dalam misi tersebut BAPPPPEDA mengemban misi nomor 4 (empat) yakni ***“Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat”***.

Fungsi koordinasi, integrasi, evaluasi, litbang dan pengendalian pembangunan yang dimiliki oleh BAPPPPEDA menjadi unsur yang sangat berpengaruh terhadap terwujudnya pelayanan yang responsif dan profesional. Tanpa adanya perencanaan yang adaptif dan responsif dengan memperhitungkan tantangan kedepan serta dapat memadukan gerak langkah seluruh perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama, maka sulit terwujud birokrasi yang responsif dan profesional.

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan BAPPPPEDA dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2. Hambatan dalam konteks ini merupakan hambatan yang dianggap secara langsung menjadi hambatan keberhasilan misi, sehingga tidak seluruh permasalahan dijabarkan menjadi hambatan.



Tabel 3.2

Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan BAPPPEDA dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Misi RPJMD yang Terkait Peran BAPPPEDA	Hambatan BAPPPEDA Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan BAPPPEDA dalam Mewujudkan Misi RPJMD
<i>Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat</i>	1. Belum optimalnya integrasi e-planning e-budgetting secara utuh;	1. Tingkatkan penggunaan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi prioritas pembangunan yang berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam visi misi;
	2. Belum konsistennya hasil evaluasi pembangunan dalam penyempurnaan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah;	2. Manfaatkan secara optimal aplikasi SievK secara konsisten untuk memperbaiki kualitas perencanaan;
	3. Masih kurangnya SDM pada sector strategis;	3. Terapkan manajemen talenta (knowledge pool) untuk bisa memanfaatkan secara optimal seluruh program strategis dalam KSN di Kab. Sumedang

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bapppeda Kabupaten Sumedang

Keberadaan Perangkat Daerah di bidang perencanaan baik tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab menghasilkan rencana pembangunan yang didasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku



kepentingan. Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi serta mewujudkan keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada pemerintah pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Menjaga keberlangsungan system perencanaan pembangunan nasional.
2. Mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2015–2019, visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi 2015–2019 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan berupaya menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah :

”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”



Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dari dua tujuan. Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015–2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappppeda Kabupaten Sumedang, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappppeda Kabupaten Sumedang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappppeda Kab. Sumedang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Belum optimalnya integrasi e-planning e-budgetting secara utuh;	Tingkatkan penggunaan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi prioritas pembangunan yang berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam visi misi.	Tingkatkan pemanfaatan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi program prioritas yang mampu bersaing dengan program unggulan dengan kabupaten tetangga.
	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas	Masih kurangnya SDM pada sector strategis;	Terapkan manajemen talenta (knowledge pool) untuk bisa memanfaatkan secara optimal seluruh program strategis dalam KSN di kab Sumedang;	Tingkatkan keterampilan SDM pada sektor strategis untuk menaikkan kemampuan promosi potensi unggulan Daerah;

3.4. Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS

Lingkungan Hidup Startegis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.



Maksud adanya penelaahan Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD daerah adalah agar tercipta keterpaduan pembangunan dengan konsep Tata Ruang Wilayah dan KLHS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rencana strategis Perangkat Daerah, atau rencana strategis daerah yang dituangkan dengan Visi dan Misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai satu kesatuan rencana pembangunan daerah atau hal-hal yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Perkembangan wilayah saat ini membutuhkan upaya perencanaan sekaligus pengendalian pembangunan yang dilakukan di segala sektor secara sinergis, berkesinambungan, dan pro-lingkungan. KLHS merupakan instrumen utama untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. KLHS wajib disusun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dengan RPJMD Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dengan RTRW, KLHS dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun telaahan strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappppeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi



Bappppeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka terdapat 6 (enam) permasalahan inti di Bappppeda Kabupaten Sumedang, yaitu:

1. Inovasi Perencanaan
2. Penyederhanaan birokrasi
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana
4. Kualitas Data
5. Transformasi Digital
6. Implementasi Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan inti di atas dapat dirumuskan isu strategis BAPPPEDA adalah :

- 1. PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;**
- 2. OPTIMALISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

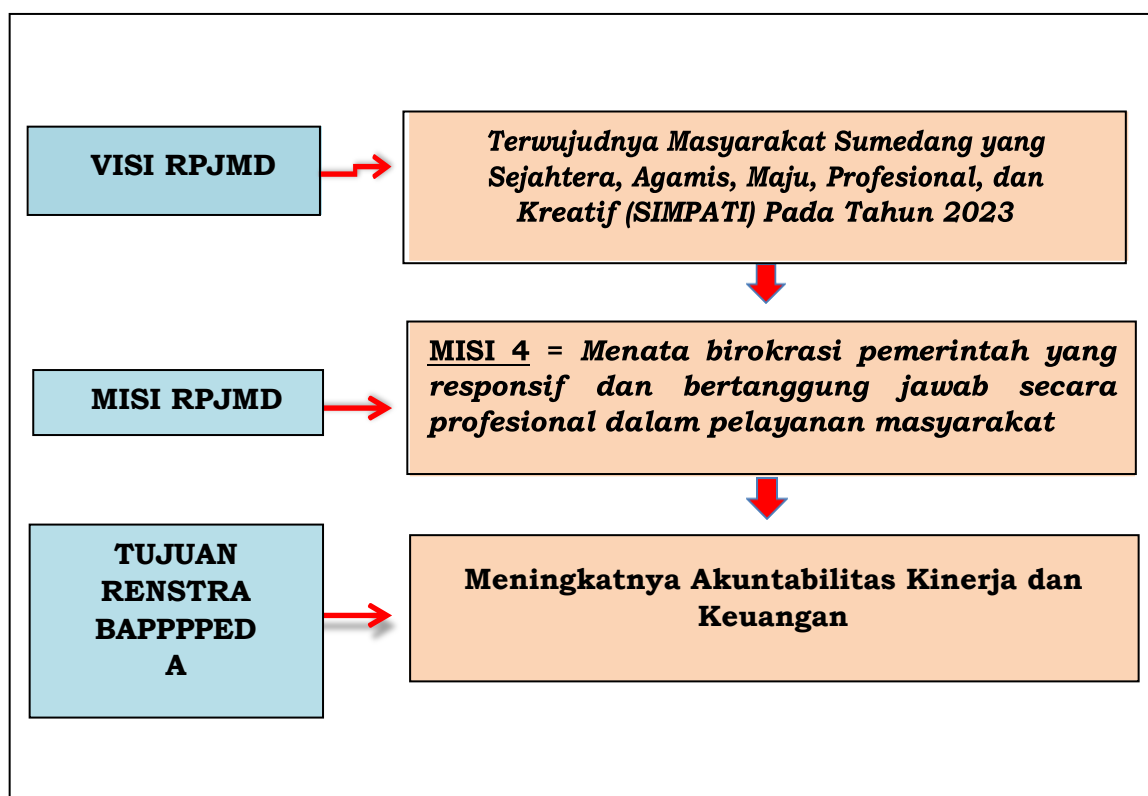
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun tujuan dari BAPPPPEDA adalah :

“ MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN “

Gambar 4.1

Tujuan Jangka Menengah BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan BAPPPPEDA untuk periode 2018–2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran BAPPPPEDA dijelaskan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran BAPPPEDA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip Kabupaten	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan	<i>Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				<i>Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang Berkatagori baik</i>	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
				<i>Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang Diimplementasikan</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A	A
				Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	97.43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan daerah Yang Berkatagori Baik	%	%	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB V

STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BAPPPEDA memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran BAPPPEDA periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan BAPPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumedang merupakan Kawasan Strategis Nasional; Pemanfaatan IPTEK disemua aspek sejalan dengan era industri 4.0; Potensi pertumbuhan ekonomi daerah. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang; Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dalam pendanaan pembangunan; Ancaman daya saing Kabupaten tetangga yang lebih potensial dalam produksi barang dan jasa.
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Perda RPJMD 2018-2023 dan RTRW 2018-2038; Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi; Adanya dukungan Pentahelix (ABCGM). 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Tetapkan prioritas program yang terdapat dalam RPJMD dengan ditopang oleh kejelasan penggunaan ruang daerah untuk memanfaatkan adanya kegiatan strategis nasional di Kab sumedang 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkatkan kualitas model pemasaran potensi unggulan daerah dengan kepastian tata ruang untuk meningkatkan minat investasi (PMA dan PMDN); Terbitkan kebijakan



	<p>(Pariwisata, industri, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan);</p> <p>b. Memanfaatkan komitmen pimpinan untuk segera memberlakukan SPBE;</p> <p>c. Memanfaatkan dukungan pentahelix dalam merumuskan potensi pertumbuhan ekonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat (Daya beli masyarakat, indeks gini, pengurangan kemiskinan).</p>	<p>kepala daerah yang mendorong penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD untuk mengurangi ketergantungan thd dana transfer secara bertahap;</p> <p>c. Tingkatkan kolaborasi litbang terapan dengan perguruan tinggi di Kawasan Sumedang dan luar untuk meningkatkan daya saing produk lokal</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Masih kurangnya SDM pada sektor strategis;</p> <p>b. Belum konsisten nya hasil evaluasi pembangunan dalam penyempurnaan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah;</p> <p>c. Belum optimalnya integrasi e-planning e-budgetting secara utuh.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Terapkan manajemen talenta (knowledge pool) untuk bisa memanfaatkan secara optimal seluruh program strategis dalam KSN di kab Sumedang;</p> <p>b. Manfaatkan secara optimal aplikasi SievK secara konsisten untuk memperbaiki kualitas perencanaan;</p> <p>c. Tingkatkan penggunaan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi prioritas pembangunan yang berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam visi misi.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Tingkatkan keterampilan SDM pada sektor strategis untuk menaikkan kemampuan promosi potensi unggulan Daerah;</p> <p>b. Susun skala prioritas pembangunan hasil evaluasi kinerja terbaik dan paling memberikan multiflier efek terhadap pertumbuhan LPE yang dapat didanai oleh anggaran yang terbatas;</p> <p>c. Tingkatkan pemanfaatan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi program prioritas yang mampu bersaing dengan program unggulan dengan kabupaten tetangga.</p>

5.2. Strategi

Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BAPPPEDA Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan;
2. Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan



5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BAPPPEDA Kabupaten Sumedang adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk;
3. Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas analis data pembangunan;
5. Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan;
6. Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk Mengakselerasi pembangunan;
7. Melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan output yang dapat mengakselerasi pembangunan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.



Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

VISI RPJMD : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023				
MISI RPJMD : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD, RKPD terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPD	Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif
				Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk
				Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan
	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"	Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas analisis data pembangunan
				Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk Mengakselerasi pembangunan
			Melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan output yang dapat mengakselerasi pembangunan	



Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{(X1 + X2 + X3)}{3} \times 100\%$ $X1 = \frac{\text{Jumlah Sasaran Renstra Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran RPJMD yang harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$ $X2 = \frac{\text{Jumlah Sasaran RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran RPJMD yang harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$ $X3 = \frac{\text{Jumlah Sasaran Renja Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran RKPD yang harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	Persen	85.00	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Ketercapaian Target Pembanguann Daerah yang Berkategori baik	$\frac{\text{Realisasi Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan}}{\text{Target Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	Persen	85.00	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah Penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan (n)}}{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanagn (n - 1)}} \times 100\%$	Persen	80.00	100	100	100	100	100	100



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappppeda Kabupaten Sumedang maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.



Tabel 6.1. a

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019			Tahun 2020				
							Target	Rp	Realisasi	Target	Rp	Realisasi		
TAHUN 2019														
			NON URUSAN										Nomenklatur SOTK Lama	
			(WAJIB SKPD)											
Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan Prinsip tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	99,61	100 %	Rp . 3.056.514.750	Rp. 3.032.157.630					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	12		Rp. 230.340.000	Rp. 228.890.808					
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12		Rp. 810.441.750	Rp. 795.825.250					
			Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	22		Rp . 25.680.000	Rp. 25.680.000					



			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	Wilayah	6		Rp. 1.157.400.000	Rp. 1.157.398.055				
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	8 Jenis, 3 Paket, 100 lembar	8 Jenis, 3 Paket, 100 lembar		Rp. 214.200.000	Rp. 212.300.000				
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional pengamanan	Orang	6		Rp. 186.850.000	Rp. 186.850.000				
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Orang	11		Rp. 278.700.000	Rp. 276.940.000				
			Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Aplikasi	1		Rp. 146.903.000	Rp. 143.273.517				
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1		Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	94,41	100%	Rp. 1.736.718.000	Rp. 1.705.916.900				
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	Unit	-		Rp. 252.250.000	Rp. 250.650.000				
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5		Rp. 683.468.000	Rp. 670.511.000				



			Penataan Halaman/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung kantor yang Ditata	2 Gedung dan 2 Halaman	2 Gedung dan 2 Halaman		Rp. 270.000.000	Rp. 268.265.000				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	unit	2		Rp. 267.800.000	Rp. 266.065.000				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit	33		Rp. 280.000.000	Rp. 267.290.900				
			Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang dipelihara	jenis	4		Rp. 53.000.000	Rp. 52.400.000				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	99,68	100%	Rp. 114.300.000	Rp. 114.300.000				
			Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Perlengkapannya									
			Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	86		Rp.114.300.000	Rp. 114.300.000				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	97,99	100%	Rp. 218.000.000	Rp. 215.650.000				



			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan	Orang	3							
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan Kapasitas	Orang	86	Rp. 218.000.000	Rp. 215.650.000					
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	%	99,19	100%	Rp. 166.405.750	Rp. 165.554.000				
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah									
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja sKPD	Dokumen	21		Rp. 114.705.750	Rp. 114.205.750				
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12		Rp. 51.700.000	Rp. 51.348.250				
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	%	97,85	100%	Rp. 81.000.000	Rp. 79.718.500				



				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD									
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	13		Rp. 81.000.000	Rp. 79.718.500				
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	98,99	100%	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	4		Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				
			URUSAN PERENCANAAN										
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	%	85	100%	Rp. 5.559.706.500	Rp. 4.979.253.796				
		2. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah;		%	70								



			3. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA;	%	78								
			4. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial;	%	80								
		Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	70								
		Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA	%	78								
		Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	%	80								
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Dokumen	3	100%	Rp. 428.419.400	Rp. 427.708.400					



			Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2		Rp. 221.556.000	Rp. 181.331.000					
			<i>Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>											
			<i>Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>											
			Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di Verifikasi	Dokumen	110		Rp. 46.929.750	Rp. 46.929.750					
			Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dokumen	1		Rp. 136.524.750	Rp. 126.274.750					
			Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang di Verifikasi	Dokumen	55								
			Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	4		Rp. 364.140.000	Rp. 330.930.000					
			Forum Delegasi Musrenbang (FDM)	- Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Kewilayahan	Dokumen	2		Rp. 258.000.000	Rp. 240.400.000					



				- Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas	Orang	60							
			Penguatan Kapasitas Perencana	Jumlah Aparatur Perencana yang Kompeten Dan Berkualitas	Orang	61	Rp. 270.568.000	Rp. 266.904.000					
			Pengelolaan Sistem RKPD Online	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan	Sistem	3	Rp. 374.298.000	Rp. 373.218.000					
			Sinergitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Dokumen	1	Rp. 75.000.000	Rp. 72.900.000					
			<i>Background Study Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA</i>										
			Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	Dokumen	1	Rp. 63.000.000	Rp 63.000.000					



			Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1		Rp. 340.000.000	Rp. 283.668.650					
			<i>Background Study Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA</i>											
			Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan	<i>Dokumen</i>	2		Rp. 149.260.000	Rp. 149.260.000					
			<i>Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Desa</i>											
			<i>Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan</i>											
			Penguatan Perencanaan AMPL	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi (Penunjang Pokja AMPL)	Dokumen	1		Rp . 73.000.000	Rp. 65.250.000					



			Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen laporan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah	Dokumen	1		Rp . 128.000.000	Rp. 128.000.000				
			Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Kabupaten Sehat Klaisifikasi Wistara dan Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat Klasifikasi Wistara	Dokumen	2		Rp. 67.620.000	Rp.67.120.000				
			Perencanaan Kawasan Industri Ujungjaya	Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan industri ujungjaya	Dokumen	1		Rp .320.000.000	Rp. 276.303.075				
			Perencanaan Kawasan Industri Buahdua	Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan industri buahdua	Dokumen	1		Rp. 300.000.000	Rp. 269.972.350				
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1		Rp. 140.000.000	Rp. 139.400.000				
			Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Raperda Pemajuan Kasumedangan	Dokumen	1		Rp .161.731.500	Rp. 160.636.700				



			Rencana Pengembangan Muatan Lokal Kasumedangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Muatan Lokal Kasumedangan	-	1		Rp. 60.549.100	Rp. 59.999.100				
			Pengelolaan SIPD	Jumlah dokumen informasi pembangunan daerah	Dokumen	2		Rp. 111.110.000	Rp.100.869.871				
			Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen pelaporan Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Dokumen	1							
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	-								
			Penyusunan Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang	Jumlah Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan berbasis GIS	Dokumen	1		Rp. 200.000.000	Rp. 187.871.000				
			<i>Studi Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang</i>										



			Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
			Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Profil Daerah	Dokumen	1							
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Jatigede	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata Jatigede	Dokumen	1	Rp. 500.000.000	Rp. 479.873.050					
			<i>Penyusunan Masterplan Pariwisata Jatigede</i>	<i>Jumlah Dokumen Masterplan Pariwisata Jatigede</i>									
			Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	Rp 160.000.000	Rp. 150.088.250					
			<i>Raperda tentang CSR</i>	<i>Jumlah Dokumen Raperda CSR</i>									
			<i>Penguatan program CSR</i>	<i>Jumlah Dokumen Penguatan Program CSR</i>									
			Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dokumen	2	Rp 510.000.000	Rp. 329.245.850					



			<i>FS dan DED GEOTHEATER Rancakalong</i>											
			Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah Berita Acara Musrenbang	<i>Dokumen</i>	3								
			Penyusunan Rancangan Teknokratik RJMD	Jumlah Dokumen Teknokratik RPJMD	<i>Dokumen</i>	1								
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	<i>Dokumen</i>	1								
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan	<i>Dokumen</i>	2								
			Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah anggota TKPK yang kompeten	<i>Orang</i>	50								
			Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian TPB/SDGs	Laporan Capaian TPB/SDGs	<i>Laporan</i>	1								



			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1								
			Pengendalian Kebijakan SPBS	Jumlah Dokumen Pengendalian Kebijakan SPBS	Dokumen	2								
			Penyusunan Perencanaan, Penanganan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan, penanganan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1								
			Penguatan Kelembagaan Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL)	Jumlah Anggota Pokja AMPL yang kompeten	Orang	35								
			Penguatan Kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)	Jumlah Anggota Pokja PKP yang kompeten	-									
			Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Sanitasi (Air Bersih, Air Limbah Domestik, dan Persampahan)	Laporan Capaian Sanitasi Real	Laporan	1								



			Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kawasan Perumahan Wilayah Perkotaan	Jumlah Dokumen Masterplan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perumahan Wilayah Perkotaan	-									
			Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Reviu RISPAM Kabupaten Sumedang	Dokumen	1								
			Perencanaan Kawasan Kota Baru Wilayah Timur (Kecamatan Tomo)	Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan kota baru wilayah timur (Kecamatan Tomo)	Dokumen	1								
			Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian	-									
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	-									
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	-									
Mengoptimalkan Hasil penelitian dan pengembangan dalam Implementasi	Meningkatnya Implementasi Hasil penelitian dan Pengembangan		URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											



Perencanaan Pembangunan			Program Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	80%	100%	Rp. 2.147.685.000	Rp. 2.028.286.050					
			Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Dokumen	2	Rp. 435.685.000	Rp. 408.585.000					
			<i>Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan</i>										
			<i>Kajian Pagu Indikatif</i>										
			<i>Rencana Aksi Daerah Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Sumedang</i>										
			Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Input Output	Penelitian	1	Rp. 750.000.000	Rp. 744.221.200					
			Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	Rp. 380.000.000	Rp. 368.012.600					
			Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang	Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang	Dokumen	1	Rp. 332.000.000	Rp. 281.970.100					



			<i>Kajian Pemberdayaan Ekonomi Interchange Tol Cisumdawu</i>	<i>Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Ekonomi Interchange Tol Cisumdawu</i>										
			Kajian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Dokumen Kajian LP2B	Dokumen	1		Rp. 250.000.000	Rp. 225.497.150					
			Kerjasama Riset Daerah	Jumlah Kerjasama Riset dengan Lembaga Penelitian	1 Penelitian									
			Kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	-									
TAHUN 2020														
			NON URUSAN											
			(WAJIB SKPD)											
Meningkatnya Kualitas Kinerja tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	99,61				100%	Rp. 2.273.612.250	Rp. 2.231.395.358		



yang baik (Good Governance)	Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	12					Rp. 228.400.000	Rp. 209.984.653				
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12						Rp. 592.872.250	Rp. 577.542.681			
			Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	22							Rp. 26.640.000	Rp26.640.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	Wilayah	6							Rp. 511.930.000	Rp. 510.698.000		
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	8 Jenis, 3 Paket, 100 lembar	8 Jenis, 3 Paket, 100 lembar							Rp 269.900.000	Rp. 269.900.000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional pengamanan	Orang	6							Rp .187.150.000	Rp.186.191.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Orang	11							Rp, 279.300.000	Rp. 277.800.000		
			Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Aplikasi	1							Rp. 177.420.000	Rp. 172.639.024		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1										



			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	94,41				100%	Rp. 2.386.364.250	Rp. 2.369.755.150		
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	Unit	-								
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5					Rp. 881.062.000	Rp. 874.382.000		
			Penataan Halaman/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung kantor yang Ditata	2 Gedung dan 2 Halaman	2 Gedung dan 2 Halaman					Rp. 913.000.000	Rp. 909.670.450		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	unit	2					Rp. 268.602.250	Rp. 267.535.000		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit	33					Rp. 273.300.000	Rp. 267.767.700		
			Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang dipelihara	jenis	4					Rp. 50.400.000	Rp. 50.400.000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	99,68								
			Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Perengkapannya										



			Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	86							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	97,99			100%	Rp. 19.000.000	Rp. 4.500.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan	Orang	3							
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan Kapasitas	Orang	86				Rp. 19.000.000	Rp. 4.500.000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	%	99,19			100%	Rp. 177.099.000	Rp.175.591.250		
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah									
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja sKPD	Dokumen	21				Rp. 112.104.000	Rp. 110.596.250		
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12				Rp. 64.995.000	Rp. 64.995.000		



			Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	%	97,85				100%	Rp. 86.396.000	Rp. 86.395.500		
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD										
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	13					Rp. 86.396.000	Rp. 86.395.500		
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	98,99				100%	Rp.45.000.000	Rp. 45.000.000		
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	4					Rp.45.000.000	Rp. 45.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	%	100				100%	Rp. 1.725.512.000	Rp. 1.689.181.800		
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Dokumen	3					Rp. 252.534.500	Rp. 252.034.500		



			Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2					Rp. 187.570.000	Rp. 178.348.800		
			<i>Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>											
			<i>Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>											
			Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	4					Rp .394.950.000	Rp.388.518.000		
			Forum Delegasi Musrenbang (FDM)	- Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Kewilayahan	Dokumen	2					Rp.189.000.000	Rp.189.000.000		
				- Jumlah Anggota Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang Kompeten dan Berkualitas	Orang	60								
			Penguatan Kapasitas Perencana	Jumlah Aparatur Perencana yang Kompeten Dan Berkualitas	Orang	61					Rp. 28.790.000	Rp. 26.290.000		
			Pengelolaan Sistem RKPD Online	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan	Sistem	3					Rp. 360.925.000	Rp. 355.998.000		
			Pengelolaan SIPD	Jumlah dokumen informasi pembangunan daerah	Dokumen	2					Rp. 44.850.000	Rp.44.850.000		



			Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	-						Rp. 266.892.500	Rp. 254.142.500		
			Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Persentase Kecelerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	70			100%		Rp. 965.867.000	Rp. 904.829.395		
			Sinergitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Dokumen	1					Rp. 377.000.000	Rp.336.737.000		
			Penyusunan Perencanaan, Penanganan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan, penanganan dan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1					Rp. 139.719.000	Rp. 139.486.000		
			Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Reviu RISPAM Kabupaten Sumedang	Dokumen	1					Rp.281.730.000	Rp.269.993.900		



			Intergrated Participatory Development And Management Of Irigaation Program-IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu	Dokumen	1					Rp.167.418.000	Rp.159.612.495		
			Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA	%	78			100%		Rp.1.212.900.000	Rp.1.166.071.150		
			Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1					Rp. 329.900.000	Rp. 300.058.950		
			Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian	-						Rp. 304.000.000	Rp. 300.970.350		
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	-						Rp. 534.000.000	Rp. 523.432.850		



			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	-						Rp. 45.000.000	Rp. 41.609.000		
			Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	%	80				100%	Rp. 987.335.000	Rp. 979.150.000		
			Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	Dokumen	1					Rp. 200.000.000	Rp. 199.630.000		
			Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Kabupaten Sehat Klaisifikasi Wistara dan Dokumen Paguyuban Sumedang Sehat Klaisifikasi Wistara	Dokumen	2					Rp. 152.335.000	Rp. 152.265.000		
			Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah anggota TKPK yang kompeten	Orang	50					Rp.330.000.000	Rp.329.680.000		
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1					Rp. 255.000.000	Rp.247.575.000		



			Pengendalian Kebijakan SPBS	Jumlah Dokumen Pengendalian Kebijakan SPBS	Dokumen	2					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000		
Mengoptimalkan Hasil penelitian dan pengembangan dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Implementasi Hasil penelitian dan Pengembangan		URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
			Program Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	80%				100%	Rp. 338.812.400	Rp. 334.562.400			
			Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Dokumen	2					Rp. 338.812.400	Rp. 334.562.400		



Tabel 6.1. B

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										Tahun 2021				
										Target	Rp			
1	2	3				4	5	6	7	9	12			
MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN					20.747.036.494			
		5	01								20.406.841.494			
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100,00	100,00	12.786.808.194		
							Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		100,00	100,00				
							Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		85,00	100,00				



							Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100,00	100,00		
							Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		85,00	100,00		
							Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100,00	100,00		
							Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100,00	100,00		
							Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100,00	100,00		
		5	01	01	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				81.381.250	
		5	01	01	2,0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.991.650
				01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.611.250
		5	01	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.046.750



				01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.612.250		
		5	01	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	127.207.700		
		5	01	01	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8.286.790.094		
		5	01	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.194.790.094		
		5	01	01	2,0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000		
		5	01	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	78.500.000		
		7	01	01	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
		5	01	01	2,0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000		
				01	2,0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kali	2 Kali	12 Bulan	2.000.000		



				01	2,0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					14.000.000		
		5	01	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	5 Laporan	3 Laporan	215.000.000		
		5	01	01	2,0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	Orang	42.500.000		
		5	01	01	2,0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	Orang	Orang	-	40.000.000		
		5	01	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Orang	85 Orang	85 Orang	50.000.000		
		5	01	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.027.379.600		
		5	01	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	251.826.000		
		5	01	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	205.130.000		
		5	01	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.241.000		
		5	01	01	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.164.600		



		5	01	01	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	401.848.000		
		5	01	01	2,0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.170.000		
		5	01	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	423.091.400		
		5	01	01	2,0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	5 Jenis	4 Jenis	423.091.400		
		5	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.458.740.000		
		4	01	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					176.000.000		
		5	01	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000		
		5	01	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				910.090.000		
		7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



		8	01	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					266.060.000		
		9	01	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		
		10	01	01	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					153.180.000		
		11	01	01	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya					369.890.000		
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keseleraan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0%	100%	100%	1.749.401.250		
		5	01	02	2. 01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4 Dokumen	6 Laporan	974.233.250		
		5	01	02	2.0 1	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pagu Indikatif	-	-	-	-		
		5	01	02	2.0 1	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	524.625.000		



		5	01	02	2.0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.874.000		
		5	01	02	2.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	20.019.000		
		5	01	02	2.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	56.506.000		
		5	01	02	2.0 1	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	20.200.000		
		5	01	02	2.0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Fasilitas FDM	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	342.009.250		
		5	01	02	2. 02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	9 Dokumen	2 Laporan	76.898.000		
		5	01	02	2.0 2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.324.000		
		5	01	02	2.0 2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	-	-	-	-		
		5	01	02	2.0 2	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang, Jumlah Buku Saku	Buku, Dokumen	5 Buku, 2 Dokumen	5 Buku, 2 Dokumen	63.574.000		
		5	01	02	2. 03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Dokumen	7 Dokumen	1 Laporan	698.270.000		



		5	01	02	2.0 3	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	698.270.000		
MENGOPTIMALKAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	MENINGKATKAN HASIL IMPLEMENTASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik	100%	100%	100%	5.870.632.050		
								2. Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Perekonomian dan SDA Berkategori Baik	100%	100%	100%			
		5	01	03	2.0 1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Berita Acara	-	-	-	-		
		5	01	03	2.0 1	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99.095.500		



		5	01	03	2,0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	228.289.250		
		5	01	03	2,0 1	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Berita Acara	-	-	-	-		
		5	01	03	2,0 1	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	113.166.250		
		5	01	03	2,0 1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	363.911.300		
		5	01	03	2, 02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.454.400.000		
		5	01	03	2,0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	582.200.000		



			5	01	03	2,0 2	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Berita Acara	-	-	-	-		
			5	01	03	2,0 2	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	132.500.000		
			5	01	03	2,0 2	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	288.500.000		
			5	01	03	2,0 2	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	266.700.000		
			5	01	03	2,0 2	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Berita Acara	-	-	-	-		
			5	01	03	2,0 2	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32.500.000		
			5	01	03	2,0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	152.000.000		



		5	01	03	2, 03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.206.935.000		
		5	01	03	2,0 3	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Berita Acara	-	-	-	-		
		5	01	03	2,0 3	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	435.000.000		
		5	01	03	2,0 3	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan pusat kegiatan wilayah BUTOM GEDE	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	770.590.000		
						- Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
						- Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kawasan Peruntukan Industri		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
						- Jumlah Dokumen FS Lahan Relokasi		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
						- Jumlah Dokumen FS Rumah Sakit Jatigede		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				



								- Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Kabupaten Sumedang	-	-	-			
								- Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumedang	-	-	-			
								- Jumlah Dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	-	-	-			
								- Jumlah Dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Waduk Jatigede	-	-	-			
		5	01	03	2,0 3	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Berita Acara	-	-	-	-		
		5	01	03	2,0 3	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah Anggota Pokja AMPL yang kompeten	Orang	35 Orang	35 Orang	1.830.000.000		
								- Jumlah Fasilitas Pembangunan Air Minum	Desa	7 Desa	7 Desa			



									- Jumlah Anggota Pokja PKP yang kompeten	-	-	-			
									- Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pamsimas	-	-	-			
									- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pamsimas	-	-	-			
									- Updating Aplikasi Openpet	-	-	-			
		5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinergitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		171.345.000		
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan	0%	100%	100%		340.195.000		
		5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan		17.995.000		
		5	05	02	2,01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-	-	-		-		
		5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		17.995.000		
		5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan		25.200.000		
		5	05	02	2,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		12.300.000		



		5	05	02	2,0 2	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 2	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 2	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 2	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000		
		5	05	02	2, 03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 3	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 3	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 3	07	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	-		
		5	05	02	2,0 3	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-		



		5	05	02	2, 04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	297.000.000		
		5	05	02	2,0 4	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	282.000.000		
		5	05	02	2,0 4	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil Sosialisasi dan Diseminasi Kelitbangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000		



Tabel 6.1. C

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	Kategori		- Kategori		- Kategori		A Kategori		A Kategori		A Kategori			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori Baik	- Persen - Persen	- Persen - Persen		- Persen - Persen		- Persen - Persen		100 Persen 100 Persen		100 Persen 100 Persen		100 Persen 100 Persen			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan berkategori Baik	- Persen - Persen	- Persen - Persen	0 0	- Persen - Persen	0 0	- Persen - Persen	0 0	100 Persen 100 Persen	1,410,000,000 1,210,100,000	100 Persen 100 Persen	1,526,000,000 1,234,350,000	100 Persen 100 Persen	0 0		



		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	7 Laporan	1,410,000,000	7 Laporan	1,526,000,000	7 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	3 Laporan	242,500,000	3 Laporan	266,750,000	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	1 Laporan	967,600,000	1 Laporan	967,600,000	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik Persentase Ketercapaian Target Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik	- Persen	- Persen	0	- Persen	0	- Persen	0	100 Persen	4,442,769,300	100 Persen	4,817,046,230	100 Persen	0	
					- Persen	- Persen	0	- Persen	0	- Persen	0	100 Persen	2,512,500,000	100 Persen	2,690,750,000	100 Persen	0	
					- Persen	- Persen	0	- Persen	0	- Persen	0	100 Persen	2,876,000,000	100 Persen	2,940,000,000	100 Persen	0	



		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	8 Laporan	2,512,500,000	8 Laporan	2,690,750,000	8 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	8 Laporan	2,876,000,000	8 Laporan	2,940,000,000	8 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	6 Laporan	4,442,769,300	6 Laporan	4,817,046,230	6 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Nilai SAKIP Kabupaten	- Kategori	- Kategori		- Kategori		- Kategori		A Kategori		A Kategori		A Kategori		
	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	- Persen	- Persen		- Persen		- Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	Persen Persen	Persen Persen	0 0	- Persen - Persen	0 0	- Persen - Persen	0 0	100 Persen 100 Persen	1,275,000,000 350,000,000	100 Persen 100 Persen	1,502,500,000 400,000,000	100 Persen 100 Persen	0 0	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	2 Laporan	300,000,000	2 Laporan	335,000,000	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	5 Laporan	325,000,000	5 Laporan	397,500,000	5 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	4 Laporan	650,000,000	4 Laporan	770,000,000	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	2 Laporan	350,000,000	2 Laporan	400,000,000	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK	-Kategori - Opini	-Kategori - Opini		-Kategori - Opini		-Kategori - Opini		A Kategori WTP Opini		A Kategori WTP Opini		A Kategori WTP Opini		
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah				SAKIP Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-Kategori - Poin	-Kategori - Poin		-Kategori - Poin		-Kategori - Poin		A Kategori 33 Poin		Kategori 33 Poin		Kategori 33 Poin		
				Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tertib dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan														



				Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai																
				Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Pers Pers Pers Pers	Pers Pers Pers Pers	0 0 0 0	- Persen - Persen - Persen - Persen	0 0 0 0	- Persen - Persen - Persen - Persen	0 0 0 0	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	20,000,000 286,360,000 8,257,648,660 1,262,870,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	23,000,000 323,170,000 8,287,648,660 1,355,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	0 0 0 0			
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Pers Pers Pers	Pers Pers Pers	0 0 0	- Persen - Persen - Persen	0 0 0	- Persen - Persen - Persen	0 0 0	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,074,915,000 305,000,000 1,341,070,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,302,080,000 360,000,000 1,460,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen	0 0 0			
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memadai																
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan																
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai																
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai																



		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	4 Laporan	305,000,000	4 Laporan	360,000,000	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	3 Laporan	8,257,648,660	3 Laporan	8,287,648,660	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	23,000,000	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	5 Laporan	286,360,000	5 Laporan	323,170,000	5 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	7 Laporan	1,262,870,000	7 Laporan	1,355,000,000	7 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	3 Laporan	1,074,915,000	3 Laporan	1,302,080,000	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	3 Laporan	1,341,070,000	3 Laporan	1,460,000,000	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Laporan	- Laporan	0	- Laporan	0	- Laporan	0	4 Laporan	815, 860, 000	4 Laporan	875, 000, 000	4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangu n, Penelitian dan Pengembang an Daerah	
--	--	--------------	---	---	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---	---	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappppeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang Berkatagori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Implementasi hasil Penelitian Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan Perubahan RPJMD sesuai tugas dan fungsi Bappppeda. Perubahan Renstra Bappppeda Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappppeda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018-2023.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya secara efektif, bergantung pada pemahaman, kesadaran, dedikasi dan kerja keras atau upaya sungguh-sungguh dari semua pihak baik secara internal di lingkungan Bappppeda Kabupaten Sumedang maupun dukungan secara eksternal para stakeholder dan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Bappppeda Kabupaten Sumedang untuk periode 2018-2023 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan.